



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI
TENTANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)
KE KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 26-28 NOVEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah 39,1387 km² atau 3.913,87 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 176.429 jiwa dan 54.238 kepala keluarga. Terdapat 5 Kecamatan, 35 Kelurahan, dan 179 Lingkungan. Sedangkan lokasinya terletak 50 km dari Bandara Kuala Namu (35 Menit), 80 km dari Kota Medan, dan 90 km ke Danau Toba, Parapat.

Tempat wisata di Kota Tebing Tinggi ada Istana Datuk Bandar Kajum, dan Museum dan bangunan bersejarah di kota Tebing Tinggi, selain itu ada waterpark New Kencana dan water park Gundaling di Kecamatan Tambangan. Sedangkan untuk kuliner di Kota Tebing Tinggi ada lemang, roti kacang, makanan India, soto, mie rebus, kacang intip, ada juga batik, sulaman kristik.

Selama dua tahun pandemi COVID-19, mayoritas sekolah telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan terbatas, termasuk juga di Kota Tebing Tinggi. Dampak dari penutupan sekolah yang berkepanjangan membuat peserta didik semakin tertinggal dalam belajar. Bukan saja memperlebar kesenjangan pendidikan, kondisi ini juga berdampak nyata pada hilangnya pengalaman belajar (*learning loss*), penurunan capaian belajar, dan resiko putus sekolah.

Berdasarkan survei dari pelaporan 53.679 satuan pendidikan pada aplikasi survei PTM pada jenjang PAUD Dikdasmen Kemdikbudristek tertanggal 20 Agustus 2021, dapat diketahui secara umum pelaksanaan PTM terbatas. Hasil survey menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas memiliki kendala; belum diberikannya izin oleh pemda/satgas COVID-19 daerah (64%), sebagian besar GTK belum mendapatkan vaksin (14%), orang tua belum mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas (10%) dan berbagai alasan lainnya (12%). Pemda Tebing Tinggi mendorong agar PTM dapat di perluas mengingat kesiapan daerah yang telah memvaksin hampir seluruh para tenaga pendidik kecuali yang tidak bisa di vaksin karena memiliki komorbid.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, dan 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
6. PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
8. SE Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
9. SKB Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01 /Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan rapat intern Komisi X DPR RI tanggal 2 November 2021.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ini meliputi:

1. Kebijakan dan strategi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) khususnya di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
2. Perkembangan pelaksanaan pembukaan sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas;
3. Penggunaan kurikulum darurat selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19;
4. Implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020-2021 Dan Tahun Akademik 2020-2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

C. Kegiatan

Kegiatan selama kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan tentang PembelajaranTatap Muka (PTM) diterima oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Oki Doni Siregar dan para pemangku kepentingan dengan melakukan pertemuan dengan yaitu:

1. DPRD Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi Sumatera Utara;
3. Dewan Pendidikan Tebing Tinggi Sumatera Utara;
4. Ketua organisasi profesi pendidikan di Tebing Tinggi Sumatera Utara (PGRI, IGI, MGMP dan FSGI);
5. Wali Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;
6. Ketua LPMP Tebing Tinggi Sumatera Utara;
7. Perwakilan Komite Sekolah dari beberapa satuan pendidikan;
8. Perwakilan Kepala Sekolah dan peserta didik (SD, SMP, SMA, SMK) Tebing Tinggi Sumatera Utara;

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan tinjauan lapangan ke SDN – SMPN 10 Terpadu kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

D. Tim Kunjungan kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih, MM (A-444/ F-PKS). Tim didukung oleh Sekretariat Komisi X DPR, Tenaga Ahli Komisi X DPR, dan wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, tim juga didampingi oleh Pejabat mitra kerja Komisi X DPR RI dari Kemendikbudristek RI, yaitu Dr. Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd sebagai Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Pendidikan tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik dan lancar serta telah sesuai dengan protocol Kesehatan. Semua Sekolah SD dan SMP Di Kota Tebing Tinggi siap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan yang ketat.
2. Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2021/2022 di kota Tebing Tinggi telah dilaksanakan dengan Pembelajaran Tatap Muka dan diharapkan dapat diperluas mengingat Guru dan Tenaga Kependidikan pada saat ini sudah divaksin semua kecuali yang memiliki komorbid sehingga tidak bisa divaksin.
3. Semua Sekolah Telah Memiliki Ijin Dari Orang Tua/Wali Peserta Didik.
4. Semua Sekolah Telah Mengisi Daftar Chek Kesiapan Belajar Tatap Muka dari Kemendikbudristek dengan protokol kesehatan.
5. Daftar Jumlah satuan pendidikan di kota Tebing Tinggi ada sebanyak 267 satuan pendidikan yaitu sebanyak 99 berstatus Negeri dan 168 berstatus Swasta yang lebih jelasnya dapat terlihat pada table dibawah ini jumlahnya berdasarkan jenjang pendidikan dari PAUD hingga Pendidikan Menengah.

Jenjang	Negeri	Swasta	Jumlah
Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	5	96	101
Kelompok Bermain	0	56	56
Satuan Paud Sejenis	0	6	6
Tempat Penitipan Anak	0	1	1
Taman Kanak-Kanak	5	33	38
Pendidikan Dasar	86	44	130
Sekolah Dasar	76	27	103
Sekolah Menengah Pertama	10	17	27
Pendidikan Menengah	8	28	36
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4	12	16
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4	16	20
Jumlah Keseluruhan	99	168	267

6. Terkait jumlah peserta didik di kota Tebing Tinggi ini totalnya berjumlah 44.542 peserta didik dengan data detailnya perjenis kelamin tergambar sebagaimana tabel dibawah.

Jenjang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	1.757	1.689
Kelompok Bermain	813	779	1592
Satuan Paud Sejenis	40	40	80
Tempat Penitipan Anak	0	0	0
Taman Kanak-Kanak	904	870	1774
Pendidikan Dasar	14.430	13.718	28.148
Sekolah Dasar	9.327	8.598	17925
Sekolah Menengah Pertama	5.103	5.120	10223
Pendidikan Menengah	6.421	6.527	12.948
Sekolah Menengah Atas (SMA)	2.787	3.688	6475
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3.634	2.839	6473
Jumlah Keseluruhan	22.608	21.934	44.542

B. Permasalahan

Permasalahan dan hambatan pendidikan tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan tantangan dilapangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, antara lain:

1. Pekerjaan guru menjadi lebih banyak di samping tatap muka terbatas juga harus melakukan daring.
2. Waktu Belajar Terlalu Singkat, Sehingga Pembelajaran Tidak Maksimal.
3. Kebutuhan Guru di Tebing Tinggi tiap tahun bertambah diakibatkan banyaknya guru yang pensiun di Kota Tebing Tinggi. Pada saat ini guru PPPK untuk Tebing Tinggi dengan Formasi sebanyak 189 Orang, baru terisi pada tahap I sebanyak 64 Orang dengan sisa formasi sebanyak 125 Orang. Untuk itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berharap Formasi ini terisi semua untuk mengurangi kesenjangan kekurangan guru pada masa yang akan datang.

III. PEMBAHASAN

A. Pandangan Pemerintah Daerah tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Oki Doni Siregar dan pemangku kepentingan bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa saat ini Kota Tebing Tinggi sedang mengalami banjir dan ini kewenangan dari pusat untuk saluran air bukan wilayahnya daerah selain itu karena tidak cukup anggaran dari kota untuk itu perlu disuara ke pusat untuk segera dapat diperbaiki agar tidak banjir lagi.
2. Dalam pengangkatan guru PPPK saat ini dari Kota Tebing Tinggi ada sejumlah 87 yang lulus dari 189 orang, penganggaran pembiayaan PPPK akan dibiayai oleh APBN namun belakangan di ralat dana dititipkan di DAU namun DAU ada refocusing untuk Pandemi COVID 19, jadi Pemerintah Daerah Kota Tebing tinggi mempertanyakan dimana dititipkannya dana guru dari APBN.
3. Dalam PTM di Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi memastikan bahwa Satuan Pendidikan telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Guru dan Pegawai Sudah divaksin
 - b. Memiliki Ketersediaan Sarana Sanitasi Dan Kebersihannya
 - 1) Toilet bersih dan layak
 - 2) Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*
 - 3) Disinfektan
 - c. Mampu mengakses Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - d. Kesiapan menerapkan wajib masker
 - e. Memiliki Thermogun
 - f. Memiliki pemetaan warga Satuan Pendidikan yang
 - g. Memiliki *comorbid* tidak terkontrol
 - h. Tidak memiliki akses transportasi yang aman

- i. memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.
 - j. Mendapat persetujuan komite sekolah
 - k. Memperoleh Ijin dari orang tua/wali siswa
 - l. Ada ijin Tatap Tatap Muka Terbatas dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
 - m. Melakukan pemeriksaan setiap saat dengan menggunakan Daftar Periksa.
4. Terkait pengendalian COVID-19 di Satuan Pendidikan berpedoman kepada:
- a. SKB Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01 /Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020-2021 Dan Tahun Akademik 2020-2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/49/Inst/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dan Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
 - c. Instruksi Walikota Tebing Tinggi Nomor 188.45/8425 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
 - d. Instruksi Walikota Tebing Tinggi Nomor 188.45/6297 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Tebing Tinggi.
 - e. Membentuk Satgas untuk Evaluasi pelaksanaan yang melibatkan dari unsur Polres, Satpol PP, Dinkes, Puskesmas, Dishub, satuan Pendidikan, Pramuka, Komite Sekolah, Koramil.
 - f. Melakukan Razia secara berkala ditempat-tempat yang rawan kerumunan.
5. Terkait Beasiswa di Kota Tebing Tinggi, Jumlah Penerima Bantuan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) (Sumber Dana APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2021) berjumlah 7 Mahasiswa dengan total dana sebesar Rp 227.584.000,- (Rp. 32.512.00,- Per Orang) sedangkan Penerima Bantuan Uang Kepada Mahasiswa Berprestasi Asal Kota Tebing Tinggi (Sumber Dana APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2021) berjumlah 358 Mahasiswa dengan total dana sebesar Rp. 599.650.000,- (Rp. 1.675.000,- Per Orang).
- B. Pandangan Tim kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI diantaranya sebagai berikut:
- 1. Mengapresiasi komitmen, strategi dan langkah-langkah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam upaya penerapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap

Muka (PTM) yang telah menuntaskan pelaksanaan Vaksin bagi para tenaga pendidik.

2. Mendorong Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dengan melibatkan unsur masyarakat dan asosiasi lembaga/organisasi pendidikan, serta harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan SDM dan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Terhadap alokasi dana untuk guru dari APBN yang dititipkan melalui DAU namun ternyata dilakukan refocusing untuk COVID 19, Komisi X DPR RI akan menyampaikan kepada Pemerintah.

IV. USULAN DAN PERMOHONAN DUKUNGAN

Secara umum, dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa usulan dan masukan dari Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan Pemangku Kepentingan Pendidikan yang menyampaikan usulan dan permohonan dukungan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka di Kota Tebing Tinggi disambut baik oleh masyarakat untuk itu kedepan agar dapat diperluas mengingat setiap satuan Pendidikan telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
2. Kota Tebing Tinggi memiliki 127.000 jiwa yang merupakan kota jasa dan perdagangan, termasuk jasa Pendidikan, sebab kota Tebing Tinggi adalah kota Pendidikan untuk itu ada banyak karyawan dari Kota ini untuk bekerja di pabrik diantaranya ada pabrik karet sebanyak 3, pabrik kelapa sawit, kopi, kolang kaling, bahkan domba walaupun tidak ada kebunnya namun ada pabriknya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi menginginkan dibangun SMK industri di Kota Tebing Tinggi mengingat ini kewenangan provinsi namun di perlukan oleh Kota Tebing Tinggi untuk memajukan SDM di Tebing Tinggi.
3. Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi meminta beasiswa yang banyak ke Kota Tebing Tinggi paling tidak untuk 10 ribu siswa.
4. Kerajaan dan budaya di Kota Tebing Tinggi akan kami gali dan perlu dibantu oleh Komisi X DPR RI agar bisa terwujud.
5. Perpustakaan di Kota Tebing Tinggi perlu tambahan mobil perpustakaan keliling.
6. Olahraga di Kota Tebing Tinggi perlu bantuan renovasi GOR. Ada 2 yang perlu dilakukan renovasi supaya lebih dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan prestasi atlet dari Kota Tebing Tinggi yaitu GOR Marah Halim Kecamatan Tebing Tinggi dan GOR Asber Nasution Kecamatan Rambutan.

V. KESIMPULAN

Dalam kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Tebing Tinggi menyampaikan secara umum dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di Kota Tebing Tinggi berjalan lancar dan telah melakukan pemetaan lokasi satuan pendidikan yang dianggap rawan, membuat jadwal tatap muka dengan pengaturan waktu yang berbeda masuknya, kemudian membentuk satgas untuk evaluasi pelaksanaan PTM terbatas.

2. Kendala dan permasalahan yang ditemukan Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di satuan pendidikan diantaranya adalah; pekerjaan guru menjadi lebih banyak di samping tatap muka terbatas juga harus melakukan daring, waktu belajar terlalu singkat, sehingga pembelajaran tidak optimal, makin banyaknya guru yang pension setiap tahunnya, sehingga mengalami kekurangan guru.
3. Pembagian peran dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas, yaitu; pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melaksanakan supervisi kesiapan protokol kesehatan dan sarana. Komite sekolah berperan dalam memberikan rekomendasi tatap muka disekolah dan mensosialisasikan kepada orang tua siswa, satuan pendidikan mensosialisasikan kepada orang tua bagaimana teknis pelaksanaan PTM terbatas.
4. Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mendorong agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dapat diperluas mengingat saat ini realisasi pelaksanaan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga Kependidikan sudah diatas 97 %, yang belum vaksin adalah yang tergolong komorbid dan respon dari peserta didik terhadap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sangat baik serta orang tua siswa di Kota Tebing Tinggi menyambut dengan senang hati atas diberlakukannya PTM walaupun masih 50% dari jumlah rombongan belajar, karena ada kejenuhan anak belajar dirumah dan orang tua merasa kesulitan mendampingi anaknya dalam belajar karena banyak pelajaran yang tidak ia mengerti.
5. Bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh terkendala banyaknya siswa yang sangat tergantung kepada HP orang tua. kendala pelaksanaan Program Bantuan Kuota Internet dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh adalah masih sekitar 33% siswa berada di wilayah yang belum terjangkau internet.
6. Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi menyampaikan bahwa dana dari APBN untuk Guru PPPK yang dititipkan melalui DAU tidak sampai di daerah bahkan DAU mengalami pemotongan anggaran untuk COVID-19.
7. Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi menyampaikan untuk penguatan SDM di Kota Tebing Tinggi maka diperlukan berdirinya SMK Industri di Kota Tebing Tinggi dan bantuan beasiswa bagi peserta didik di Kota Tebing Tinggi.

VI. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan, tim kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Komisi X DPR RI memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek RI) untuk melakukan pemetaan terhadap daerah yang telah mampu melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara ketat dan berjalan dengan lancar agar dapat diperluas.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran APBN untuk guru PPPK mengingat Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi menyampaikan bahwa dana tersebut tidak sampai ke daerah.

3. Mendorong Pemerintah untuk terus melakukan penerimaan Guru PPPK mengingat di daerah sudah banyak kekurangan guru karena semakin banyak guru yang pensiun setiap tahunnya.
4. Mendorong Pemerintah khususnya Kemendikbudristek RI untuk pendirian SMK Industri di Kota Tebing Tinggi dan mengalokasikan beasiswa untuk peserta didik di Kota Tebing Tinggi.

VII. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Komisi X DPR RI ke Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI khususnya Kemendikbudristek RI.

Jakarta, 29 November 2021

Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Tim,

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM

A-444